

Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Dalam Memajukan Pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam

Maysarah¹, Hasan Basri M. Nur²

^{1,2}UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Email Kontributor: maysaraah7@gmail.com¹

ABSTRAK

Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1906) merupakan kekuatan Islam yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Empat sultanah, yaitu Sultanah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), Inayat Zakiatuddin (1678-1688), dan Kamalat Syah (1688-1699), secara berturut-turut memimpin kerajaan ini. Meskipun stereotip bahwa kaum perempuan berada di posisi kedua dan kepemimpinan mereka dianggap lemah, Sultanah Safiatudin berhasil menciptakan terobosan signifikan selama pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas peran Sultanah Safiatuudin dalam pengembangan pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam. Metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan digunakan, mengandalkan sumber data primer dan sekunder untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultanah Safiatuddin memberikan kontribusi besar dalam kemajuan pendidikan, melibatkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Ia mendatangkan ilmuwan asing sebagai tenaga ahli, mendorong cendekiawan untuk menulis karya ilmiah, dan memberikan beasiswa kepada ilmuwan Aceh untuk studi di luar negeri. Peningkatan pendidikan juga disokong oleh pembangunan infrastruktur seperti meunasah, zawiyah (dayah), dan perpustakaan. Sultanah Safiatuddin menunjukkan wawasan luas dalam pengembangan sektor pendidikan, menciptakan kebijakan yang mirip dengan Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Makmun dari Dinasti Abbasyiah (750-1258), yang dikenal sebagai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam.

Kata kunci: Pendidikan, Sultanah Safiatuddin, Kerajaan Aceh Darussalam

Pendahuluan

Kerajaan Aceh Darussalam bertahan sangat lama dalam lintasan sejarah. Kerajaan Islam paling berpengaruh di Asia Tenggara ini berdiri pada tahun 1496 M dan berakhir tahun 1906 M (Adan, 2013). Dalam rentang waktu 400 tahun lebih itu Kerajaan Aceh Darussalam sempat dipimpin oleh empat orang sultanah (ratu) secara berturut-turut. Mereka adalah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), Sultanah Inayat Zakiatuddin (1678-1688), dan Sultanah Kamalat Syah (1688-1699) (Nordin et al., 2018).

Dari keempat sultanah tersebut, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin adalah pemimpin dari kalangan perempuan yang paling mendominasi kemajuan dalam Kerajaan Aceh Darussalam dalam semua aspek. Hal ini disebabkan Safiatuddin melanjutkan pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (1636-1641) yang merupakan suksesor dari Sultan Agung Iskandar Muda

(1607–1636) yang berhasil membawa Aceh ke puncak (zenith) kemajuan peradaban Islam di Asia Tenggara (Syafaah, 2017). Sebagaimana diketahui, dari 35 raja/ratu yang pernah memerintah Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda adalah sosok yang berhasil mengantarkan kerajaan ke puncak kegemilangannya. Kegemilangan Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Iskandar Muda terjadi dalam semua aspek; politik dan hegemoninya di Asia Tenggara, ekonomi dan pendidikan. Digambarkan, Aceh kala itu termasuk satu dari lima kerajaan paling berpengaruh dalam dunia Islam bersama Turki Utsmani di Istanbul, Safawi di Persia, Mugal di India dan Maroko (Adan, 2013).

Melanjutkan pemerintahan yang sedang berada di puncak peradaban tentunya Sultanah Safiatuddin mewarisi kemajuan dalam berbagai aspek pula, termasuk aspek pendidikan. Perhatian kepada pengembangan pendidikan telah ada sejak masa Iskandar Muda. Akan tetapi, pengembangan pendidikan pada masa Sultanah Safiatuddin diperkenalkan beberapa pola baru, termasuk mengangkat guru besar asing untuk menjadi Qadhi Malikul Adil dan Mufti Muaddam. Dia adalah Syeih Nuruddin Ar-Raniry dari Ranir, India (Amiruddin, 2006). Dengan jabatan yang sangat strategis itu, Nuruddin Ar-Raniry ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam Kerajaan Aceh Darussalam (Mastori et al., 2023), terutama dalam memajukan pendidikan di Aceh.

Perhatian Sultanah Safiatuddin kepada pengembangan pendidikan di Aceh sangat tinggi, terbukti dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Ini ditandai dengan lahirnya karya-karya ilmiah yang memiliki citarasa literasi yang tinggi (Musyaffa, 2018). Karya tersebut seiring dengan kebijakan Sultanah Safiatuddin yang telah mengundang ulama besar dari India Aceh yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniry. Nuruddin Ar-Raniry diminta untuk menulis buku-buku tentang Islam, filsafah, hukum, sastra dan lain-lain. Sejumlah karya tulis peninggalan Nuruddin Ar-Raniry masih dapat dibaca hingga zaman modern sekarang ini (Majid, 2015).

Dalam amatan penulis, belum terdapat kajian yang memfokuskan pada aspek pengembangan pendidikan di era Sultanah Safiatuddin dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Kajian-kajian yang tersedia pada masa Sultanah Safiatuddin ini lebih banyak difokuskan pada sistem politik dan pemerintahan. Oleh sebab itu, artikel melakukan kajian tentang pengembangan pendidikan pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin di Kerajaan Aceh Darussalam. Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam melihat kemajuan Kerajaan Aceh Darussalam, terutama pada era Sultanah Safiatuddin.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (kajian kepustakaan). *Library research* menempatkan berbagai bahan bacaan sebagai sumber data. Data dalam penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dikenal juga sebagai data *real* (asli) atau data terbaru yang *up to date* (Fathoni, 2006).

Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah sumber bacaan yang ditulis pada zaman peristiwa itu berlangsung, baik ditulis oleh pelaku sejarah maupun oleh penulis yang hidup pada zaman itu. Data primer pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, terutama pada masa Sultanah Safiatuddin, yang terwariskan sampai zaman modern sekarang ini sering disebut dengan manuskrip Aceh. Manuskrip Aceh sekarang ini sebagian sudah melalui proses melalui pencetakan ulang dan penterjemahan. Bagian manuskrip yang sudah dicetak ulang dan diterjemahkan penulis maksudkan dalam laporan ini sebagai bagian dari primer, sebab ia bersumber dari data original. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Sujarweni, 2014), terutama bacaan yang ditulis bukan pada zaman peristiwa itu terjadi. Data sekunder dirujuk dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan tentang Kerajaan Aceh Darussalam atau Sultanah Safiatuddin.

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah pemilahan data berdasarkan kevalidannya. Hanya data yang dianggap valid dan dapat dipercaya kebenarannya yang digunakan. Data yang dianggap kurang valid digugurkan atau tak jadi digunakan. Ini dilakukan demi menjaga akurasi temuan penelitian. Data yang dianggap valid tersebut selanjutnya ditulis secara deskriptif yang terhubung antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga ia menjadi satu kesatuan tulisan sistematis yang mudah dibaca dan pahami (Ramadhan, 2021).

Sementara analisis data dilakukan pada setiap bagian yang menjadi temuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan kebijakan Sultanah Safiatuddin dengan pendapat dan kebijakan pemimpin negara di zaman modern sekarang. Langkah ini penulis lakukan agar mudah dalam menilai kebijakan pemimpin negara dalam kalangan perempuan masa lampau di Aceh.

Pembahasan/Hasil

A. Biografi singkat Sultanah Safiatudin

Ada empat Sultanah yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam dalam kurun waktu 59 tahun, diawali oleh Sultanah Safiattudin Tajul Alam Syah, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah, Sultanah Zaqiyatuddin Inayat

Syah hingga masa Sultanah Ratu Kamalat Syah (Baqi et al., 2022). Namun yang paling menonjol dalam segala aspek yaitu Sultanah Safiatuddin dan ia menjadi bahasan dalam tulisan ini.

Sultanah Safiatuddin bergelar Paduka Sri Sultanah Tajul-'Alam Safiatuddin Syah Johan Berdaulat *Zillu'llahi fi'l-'Alam* memiliki arti "kemurnian iman, mahkota dunia." Ia dilahirkan pada tahun 1612 dan merupakan anak tertua dari Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah (Haslinda, 2008). Safiatuddin naik tahta setelah Sultan Iskandar Tsani meninggal dunia yang merupakan suaminya sendiri (Ar-Raniry, 2021). Ia memegang kekuasaan karena dianggap mampu atas pertimbangan dari para penasehat negara.

Pengangkatan Sultanah Safiatuddin sebagai pemimpin Kerajaan Aceh Darussalam sempat memunculkan polemik di Aceh dan dunia Melayu Islam kala itu. Saat itu, terdapat pemahaman umum bahwa kaum perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin politik. Kepemimpinan politik dalam Islam adalah ranah laki-laki. Ulama Aceh dan dunia Melayu Islam pun saling mengeluarkan dalil (naqli) dan argumentasi ('aqli). Seharusnya polemik ini tak perlu terjadi di Aceh. Sebab, jauh sebelum Safiatuddin muncul, di Aceh pernah terdapat tokoh perempuan yang menjadi pemimpin politik, yaitu Ratu Nahrisyah (1405 – 1428) dari kerajaan tertua di Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai (Iskandar, 2007).

Polemik tersebut selesai setelah keluar fatwa dari Nuruddin Ar-Raniry sebagai mufti kerajaan. Nuruddin mengeluarkan fatwa bahwa Sultanah Safiatuddin berhak menjadi pemimpin dan ia telah memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin negara kala itu. Melihat kemuculan pemimpin dari kalangan perempuan di Aceh pada masa-masa awal berkembangnya Islam di Asia Tenggara, maka tidak berlebihan jika Aceh berhak dinobatkan sebagai tempat paling progresif dengan pemikiran baru di tanah Melayu, terutama dalam memperkenalkan emansipasi perempuan manakala di daerah lain kaum perempuan masih hidup dalam pasungan. Bahkan jauh sebelum Qassim Amin menulis kitab berjudul *Tahrirul Mar-ah* (memerdekakan perempuan) di Mesir (Idris, 2008).

Safiatuddin adalah perempuan yang rajin dan cerdas. Ia tekun belajar sejak kecil. Sultan Iskandar menyediakan guru dan bahan-bahan bacaan di istana untuk mendorong Safiatuddin menjadi sosok berilmu. Ia mempelajari banyak ilmu dan mahir berbahasa Arab, Spanyol, Persia, dan Urdu dengan fasih. Demikian juga, ia juga mampu menguasai ilmu sejarah, mantik, ilmu fiqh, tasawuf, dan sastra falsafah (Hasjmy, 1997).

Safiatuddin memerintah antara tahun 1641-1675 dalam kurun waktu kurang lebih 34 tahun. Safiatuddin meninggal pada tanggal 23 Oktober 1675 (3 Sya`ban 1086 H) (Azward et al., 2008). Sultanah Safiatuddin kemudian dinobatkan sebagai sultanah pertama dalam Kerajaan Aceh Darussalam, dan

menjadi sultanah kedua serantau di Aceh setelah Nahrisyah di Kerajaan Samudera Pasai yang kini berpusat di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara.

B. Pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam

Pendidikan adalah aspek peradaban paling bersinar pada masa Sultanah Safiatuddin Kerajaan Aceh Darussalam. Berdasarkan data dari berbagai sumber, bentuk kemajuan pendidikan pada era Sultanah Safiatuddin dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendidikan.

Gerakan Sultanah Safiatuddin dalam Kerajaan Aceh Darussalam ini sejalan dengan kebijakan dalam negara modern. Di Indonesia, terdapat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (UU No 20 Tahun 2003). Menurut pakar pendidikan modern, dalam memajukan pendidikan terdapat unsur penting yaitu usaha dengan penuh kesadaran dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran yang aktif sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas (Ngongo et al., 2019). SDM yang berkualitas ini harus didukung dengan penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang mumpuni sebagai wujud kepedulian pendidikan.

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, pakar pendidikan John Naisbitt dan Patricia Aburdene sebagaimana dikutip A. Malik Fadjar dalam tulisan Ari Hasan Ansori menjelaskan alasan pentingnya pembangunan SDM dan infrastruktur kependidikan menjadi suatu keharusan dalam pengembangan pendidikan di suatu negara (Ansori, 2015). Menurut penulis, pembangunan SDM sebagai bagian terpenting dalam pembangunan pendidikan sudah dilakukan pada masa kepemimpinan masa Sultanah Safiatuddin. Hal ini menunjukkan bahwa Sultanah Safiatuddin Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sosok yang visioner yaitu sudah berpikir melampaui zamannya.

Di bawah ini, beberapa hal yang khusus dibahas dalam tulisan ini terkait kemajuan pendidikan di Aceh pada masa Sultanah Safiatuddin, yaitu:

1. Kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sultanah Safiatuddin adalah pemimpin negara yang cerdas dan sangat peduli dengan pendidikan. Tercatat dalam Sejarah bahwa Sultanah Safiatuddin merupakan perempuan yang memiliki akhlak yang baik. Sejak kecil beliau sangat gemar membaca dan menulis (Mursyi, 2017). Oleh karena itu tak heran jika beliau adalah sosok wanita yang terpelajar yang sangat akrab dengan ilmu pengetahuan serta memiliki wawasan yang luas. Modal rajin membaca dan menulis pada diri Safiatuddin terbawa dalam membuat kebijakan negara ketika ia menjadi ratu.

Tidak hanya Sultanah Safiatuddin saja yang memiliki pendidikan yang hebat, namun ia juga menyiapkan penerusnya dengan sultanah mendapatkan pendidikan yang kuat di istana Darud Dunia. Mencakup berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti Agama Islam, sejarah, filsafat, kesastraan, ilmu hukum termasuk hukum tata-negara, sejarah, Bahasa Arab, Bahasa Persia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris (Mursyi, 2017).

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang paling penting dalam kemajuan suatu negara (Rozak & Az-Ziyadah, 2021). Dengan kecakapan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Sultanah Safiatuddin, Aceh Darussalam pada masa kepemimpinannya sangat memperhatikan kemajuan pendidikan terkhusus pada pemberdayaan SDM yang diharuskan berkualitas tinggi.

Tujuan dari SDM sendiri yaitu untuk meningkatkan ketahanan kompetensi setiap individu melalui berbagai cara salah termasuk melalui Pendidikan (Riniwati, 2016). Peradaban manusia sangat bergantung pada kualitas manusia yang hidup pada periodenya dan maju atau mundurnya peradaban manusia dalam segala aspek (Efendi & Kasih, 2022). Hal ini selaras dengan kontribusi Sultanah Safiatuddin Aceh yang menjadi proklamator kemajuan pendidikan melalui peningkatan mutu SDM.

Kehebatan Sultanah Safiatuddin dapat ditinjau dari beberapa metode dalam peningkatan SDM dalam bidang pendidikan diantaranya yaitu:

a. Mengangkat Ilmuwan Asing sebagai Tenaga Ahli

Sultanah Safiatuddin sudah tidak diragukan lagi intelektualnya. Ia memiliki hubungan (relasi) internasional dan jaringan internasional yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan terjalin interaksi dagang baik antar para saudagar dagang dari berbagai negara atau lebih khususnya para pakar ilmu pengetahuan. Contoh hubungan internasional Kerajaan Aceh Darussalam masa itu yaitu dengan Inggris, India, Mesir dan lainnya (Amiruddin, 2006). Aceh dimata dunia memiliki pengaruh yang besar sehingga negara luar menjadikannya sebagai sasaran dalam berbagai kepentingan termasuk dakwah Islam.

Sementara para pakar yang eksis di Aceh yang berasal dari luar negeri seperti Syekh Abdul Qadir Ibnu Hajar dari Makkah, Syekh Idrus Bayan berasal dari Baghdad dan Syekh Muhammad Ar-Raniry dari Gujarat India dan dari berbagai daerah lainnya (Matsyah, 2013). Para pakar tersebut lebih dikenal dengan sebutan ulama. Ulama bermakna orang yang memiliki pengetahuan yang banyak serta ahli dalam ilmu Agama Islam dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Pakar dalam artian yang luas saat ini yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas hampir dalam semua bidang. Tidak hanya pakar dalam bidang agama, namun juga ahli dalam berbagai keilmuan seperti pakar filsafat, kedokteran, astronomi dan lainnya. Para pakar dan ilmuwan pada masa Sultanah Safiatuddin dijadikan sebagai tenaga ahli dalam banyak bidang keilmuan.

Pada masa Sultanah Safiatuddin Aceh, pemerintahan selalu didampingin oleh ulama sebagai penasehat kerajaan. Salah satu ulama yang sangat terkemuka dan berpengaruh yaitu Nuruddin Ar-Raniry. Nama lengkap beliau adalah Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniry al-Quraysi al-Syafii. Ia berasal dari Gujarat India dan mendarat di Aceh pada tanggal 6 Muharram 1047 H/31 Mai 1637 M (Syarbaini, 2022). Ia adalah Qadhi al-Malikul Adil dan Mufti Muaddam masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani dan berlanjut hingga masa Sultanah Safiatuddin. Syeikh Nuruddinlah yang menjadi salah satu suksesor yang sangat bijak pada masa itu karena memberikan fatwa dibolehkan kepemimpinan kerajaan secara resmi dilanjutkan oleh Sultanah Safiatuddin.

Syeikh Nurudiin Ar-Raniry memiliki murid yang bernama Syeikh Abdur Rauf Al-Fansuri atau lebih dikenal dengan sebutan Syeikh Abdur Rauf as-Singkili. Ia lahir di bagian barat selatan Aceh diperkirakan pada tahun 1615 M/1030 H (Kurdi, 2021). Keduanya adalah ulama besar yang menjadi rujukan terkait segala hal dalam penyelenggaraan negara. Syeikh Nuruddin Ar-Raniry menjadi mufti besar kerajaan dan kepercayaannya Sultanah Safiatuddin. Sama halnya dengan Abdur Rauf Al-Fansuri juga pernah menjabat sebagai mufti dan Qadhi Malik al-Adil.

Untuk meningkatkan kualitas SDM di Aceh, Sultanah Safiatuddin memberikan kesempatan bagi para pakar/ulama luar negeri untuk berkhiprah dalam bidang keilmuannya di Aceh. Pada Sultanah Safiatuddin ilmu pengetahuan berkembang pesat di bumi Aceh.

b. Memelopori Penulisan Karya Ilmiah

Pembangunan SDM kependidikan telah dicetuskan oleh Sultanah Safiatuddin melalui pemberdayaan para ulama. Ulama saat itu menjadi pakar yang sangat dimuliakan dan dihormati keilmuannya (Azhari et al., 2023). Dikarenakan kecintaan Sultanah pada ilmu pengetahuan khususnya lagi dunia literasi, Safiatuddin meminta ulama yang memiliki peran dalam kerajaan untuk menulis karya ilmiah yang dibutuhkan oleh kerajaan.

Dunia literasi berkembang pesat di era Sultanah Safiatuddin. Para ilmuwan berlomba-lomba dalam melakukan kajian ilmiah dan menuliskannya di atas kertas agar dapat dibaca oleh umat. Mengingat karya ilmiah karya adalah karya yang orisinal dan telah teruji secara keilmuan. Hal ini menjadi tuntutan dan kebutuhan zaman modern untuk menghasilkan karya-karya yang bernilai tinggi.

Nuruddin Ar-Raniry dan Abdur Rauf As-Singkili yang bergelar Teungku Syiah Kuala adalah penasehat pemerintahan masa Sultanah Safiatuddin. Selain menjabat sebagai penasehat, mereka adalah pakar ilmu yang mampu mengajar keilmuan dan mampu menulis karya ilmiah yang

sangat diapresiasi oleh sultanah. Sultanah Safiatuddin meminta Syeikh Nuruddin mengarang karya ilmiah, baik dalam bahasa Melayu atau Arab. Salah satunya kitab yang berjudul *Hidayatul Imam* yang disunting kebutuhan kepentingan masyarakat umum (Said, 1981). Karya tulis ilmiah tersebut menjadi salah satu kekayaan ilmu pengetahuan para sultanah dalam kepemimpinannya.

Selain itu, Syeikh Nuruddin menulis banyak sekali karya ilmiah besar seperti yang tercantum dalam buku *Jatuh Bangun Kerajaan Aceh* bahwa diantara karya Nuruddin Ar-Raniry yaitu *Bustanul Salatin*, *Syifau A-Qulub*, *Tanbihul al-Awwaam*, dan hampir mencapai lima puluh kitab yang beliau tulis (Said, 1981). Semua karya tersebut masih dijadikan rujukan keilmuan hingga saat ini.

Begitupun Abdur Rauf As-Singkili dengan karya ilmiahnya dalam bentuk kitab bertajuk *Umdatul Ahkam*, *Kifayatu al-Muhtadi*, dan *Mir'at al-Thullab fi Tasyil Mawa'iz al-Badi'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyah li Malik al-Wahhab* dan masih banyak lainnya (Said, 1981). Karya-karya tersebut sangat spektakuler pada abad ke-19 di Asia Tenggara dijadikan sebagai asas hukum-hukum Islam. Karya-karya ilmiah mencakup tauhid, fiqh, sastra dan lainnya di tulis dalam Bahasa Arab dan Melayu (Amiruddin, 2006).

Selain sebagai pemimpin, Sultanah Safiatuddin juga merupakan seorang sastrawan dan penulis. Hal ini dijelaskan pada syair yang tertulis dalam buku A. Hasjmy yang dikutip dari buku H. M. Zainuddin Srikandi Aceh menjelaskan bahwa sang Sultanah Perempuan anak Sultan Iskandar muda sangat hobi menulis sastra, termasuk mengarang sajak atau syair (Hasjmy, 1997). Inilah salah satu faktor yang mendorong Sultanah menuntut para ilmuwan untuk terus menulis.

Sultanah Safiatuddin adalah perempuan yang menjadi contoh dan panutan bagi ratu-ratu setelahnya. Salah satunya yang mengikuti jejaknya dalam penulisan karya ilmiah yaitu Sultanah Zakiatuddin. Ia pernah juga memintahkan kepada Teungku Syiah Kuala untuk menerjemahkan Hadits Arba'in karya Imam Nawawi yang berjudul "Kumpulan 40 buah hadis dari Nawawi" (Azwad et al., 2008). Karya tersebut masih diabadikan dan dijadikan rujukan ilmu hingga saat ini oleh masyarakat khususnya para pelajar. Hal tersebut menjadi acuan bahwa karya ilmiah dan penulisannya pada masa itu sangat tinggi marwahnya dan dilestarikan oleh para sultanah penerusnya.

c. Memberikan Beasiswa bagi Ulama untuk Belajar ke Luar Negeri

Digambarkan, kondisi ekonomi pada masa Sultanah Safiatuddin terbilang maju. Itulah yang mendorongnya sanggup bekerjasama dengan pihak luar negeri dalam hubungan dagang. Digambarkan oleh Syeikh Nuruddin dalam karya fenomenalnya *Bustanus Salatin* seperti disebutkan

oleh A. Hasjmy bahwa Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin sangat makmur, bahan sandang pangan sangat murah. Hal itu karena kebijaksanaan Sultanah dalam memimpin negara (Hasjmy, 1997). Dapat diperkirakan jika negara yang aman damai sejahtera tentu memiliki kekayaan yang banyak dan dapat dipergunakan dengan semestinya oleh Sultanah Safiatuddin.

Salah satu kebijakannya yaitu memberikan beasiswa bagi ilmuwan untuk belajar ke luar negeri. Salah satu pakar yang berasal dari Aceh juga yang terkenal cerdas keilmuannya dalam dunia pendidikan seperti Syeikh Abdur Rauf As-Singkili (Amiruddin, 2006). Telah disebutkan dalam buku "*59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*" bahwa Sultanah Safiatuddin memberikan sokongan modal belajar bagi Abdurrauf As-Singkili dengan mengirimkan beliau ke luar negeri Aceh seperti ke Malaysia, India, Baghdad, Madinah dan Makkah (Hasjmy, 1997). Oleh karena itu para ulama yang belajar keluar negeri dan ketika ia kembali ke Aceh, maka ilmunya sangat dimuliakan dan diapresiasi penuh oleh Sultanah Safiatuddin demi kemajuan pendidikan.

Pogram beasiswa yang saat ini menjamur di semua negara untuk memfasilitasi masyarakatnya untuk belajar keluar negeri telah terlebih dulu dipraktikkan oleh Sultanah Safiatuudn dari Aceh Darussalam pada abad pertengahan. Ini menunjukkan bahwa Sultanah Safiatuddin sangat *visioner* atau memiliki visi yang jauh ke depan. Ia berpikir jauh ke depan dengan pola yang sangat maju yaitu membiyai pendidikan anak bangsa untuk belajar ke luar negeri. Hal tersebut dirujuk dan diikuti oleh hampir semua negara saat ini.

2. Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Kependidikan

Selain pembangunan SDM kependidikan melalui pemberdayaan warga negara, Sultanah Safiatuddin juga melakukan pembangunan infrastruktur sebagai penopang kemajuan pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang dibangun antara lain adalah:

a. Pembangunan Meunasah sebagai Pusat Pendidikan

Meunasah adalah fasilitas publik di Aceh yang tersedia di setiap kampung untuk keperluan masyarakat melakukan ibadah shalat. (Fikri, 2016). Meunasah menjadi madrasah atau di maknai dengan sekolah sebagai tempat belajar (Sukri et al., 2023). Dalam setiap kampung diangkat seorang imam untuk mengurus persoalan ibadah yang disebut *Imum Chiek*. Selain sebagai tempat ibadah, meunasah juga difungsikan sebagai tempat pelaksanaan musyawarah masyarakat kampung dan kegiatan sosial lainnya (Matsyah, 2013).

Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda gerakan baru dalam bidang pengembangan pendidikan di Aceh yang dilakukan adalah

menjadikan Masjid Raya Baiturrahman sebagai lembaga pendidikan tinggi atau universitas. Para pelajar dari negara-negara Melayu berdatangan untuk belajar di Universitas Baiturrahman Banda Aceh di berbagai fakultas atau *Dar* seperti Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ilmu Sejarah, Fakultas Hukum dan masih banyak fakultas lainnya (Matsyah, 2013).

Melanjutkan kemajuan pada masa kepemimpinan ayahnya Iskandar Muda, Sultanah Safiatuddin melakukan terobosan baru, yaitu membangun dan menjadikan meunasah sebagai pusat pendidikan untuk masyarakat sekitar (ZA, 2003). Kaum lelaki dan perempuan hingga anak-anak memiliki jadwal belajar di meunasah secara tetap. Kerajaan Aceh Darussalam menyediakan anggaran untuk keperluan berbagai fasilitas belajar di meunasah (Matsyah, 2013). Kondisi masyarakat saat itu dapat digambarkan semua warga negara wajib belajar, bahkan sejak kecil di meunasah. Adapun materi yang dipelajari meliputi belajar membaca Al-Quran hingga belajar menulis dan menghitung, sehingga pada masa itu masyarakatnya dipastikan tidak buta huruf.

b. Mempopulerkan Lembaga Pendidikan Dayah

Selain meunasah, lembaga yang sangat berperan penting di Aceh Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Dayah (Zawiyah). Hal itu senada dengan Ibrahim Husain jelaskan yang dikutip oleh Syadli dalam tulisannya yang berjudul " *Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah Dan Rangkang*" yang sependapat dengan penulis bahwa institusi yang paling populer masa itu sebagai lembaga pendidikan termasuk salah satunya yaitu dayah (ZA, 2003). Di Aceh dikenal dayah, sedangkan umumnya orang-orang yang diluar Aceh menyebutnya dengan nama pondok pesantren.

Lembaga pendidikan yang sangat bersinar kejayaannya yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda dan terus berlanjut puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sultanah Safiatuddin. Pendidikan di Aceh masa itu menjadi tujuan utama para pelajar di Asia Tenggara. Banyak pelajar dari luar negeri yang datang ke Aceh untuk belajar ilmu pengetahuan (Said, 1981). Prestasi Sultanah Safiatuddin tidak ada yang membantah. Ia sangat maju dan tidak terbelakang sehingga Ia menerapkan kebijakan agar semua orang berhak mendapatkan hak-haknya baik laki-laki maupun perempuan untuk mengecap pendidikan

Meskipun dayah menjadi lembaga pendidikan formal pada masa itu, namun tidak semua daerah memiliki dayah seperti halnya meunasah. Dayah umumnya berada pada setiap mukim. Dayah telah diresmikan oleh Sultan Iskandar Muda dan selanjutnya dipopulerkan oleh anaknya Sultanah Safiatuddin (ZA, 2003). Selanjutnya dayah tersebut dibagi menjadi rangkang dan bale.

Pada umumnya yang belajar di rangkang adalah pelajar lanjutan dari meunasah yang sudah mampu membaca al-Qur`an. Mereka melanjutkan pelajaran ilmu agama seperti tauhid, fiqih dan tasawuf. Sedangkan yang belajar di bale yaitu pelajar yang masih kanak-kanak yang baru memulai belajar membaca al-Qur`an. Selanjutnya target orang tua yaitu memasukkan anaknya di lembaga pendidikan yaitu dayah. Lembaga tersebut hingga saat ini masih populer dan terus berkembang mengikuti zaman.

c. Membangun Perpustakaan

Sultanah Safiatuddin sebagai perempuan yang peka terhadap ilmu pengetahuan terus berusaha menggagaskan ide-ide baru pada kepemimpinannya. Perjuangan sang ayah yaitu Sultan Iskandar Muda yang telah membangun Universitas Mesjid Baitul Karim, Baitul Musyahadah dan Mesjid Raya Baiturrahman yang terkenal saat ini (Matsyah, 2013). Sultanah membangun perpustakaan negara sebagai pengembangan sumber ilmu pengetahuan sebagai usaha mencerdaskan masyarakatnya.

Hal ini berdasarkan penjelasan dalam syair yang penulis temukan dalam buku *"59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu"* yang dikutip oleh A.Hasjmy dari H.M Zainuddin bahwa Sultanah Safiatuddin digambarkan karena begitu cintanya pada ilmu pengetahuan, Ia memberikan modal atau belanja bagi para ulama yang menjadi pakar bidang pendidikan untuk membantu proses penulisan para ulama tersebut seperti Nuruddin A-Raniry maupun Abdur Rauf As-Singkili (Hasjmy, 1997).

Dukungan penuh kepada para pakar, sastrawan dan kaum intelektual untuk memajukan bakat. Pada periode itulah muncul para cendekiawan seperti Hamzah Fanshuri, Nuruddin Ar-Ranirry, Abdur Rauf, dan lainnya (Cibro, 2017). Walaupun saat itu belum ada yang menjelaskan maksud dari fasilitas untuk menulis dan menyimpan karya ilmiah para ulama itu dengan sebutan perpustakaan, maka dapat disimpulkan sebuah pendapat bahwa setiap tempat yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan tentu terdapat koleksi karya ilmiah berupa kitab-kitab karangan ulama, termasuk masjid, meunasah atau dayah yang kala itu menjadi tempat belajar paling populer, sudah pasti di dalamnya tersimpan dan terjaga kitab-kitab yang digunakan sebagai sumber belajar oleh para pelajar (Cibro, 2019).

Sebagai catatan, pola yang diterapkan Sultanah Safiatuddin dalam pengembangan pendidikan di Aceh menyerupai praktik yang pernah dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid (789-803) dan Khalifah Al-Makmun (813 – 833) pada Dinasti Abbasiyah. Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Makmun yang cinta ilmu terbukti berhasil membawa Dinasti Abbasiyah ke kemajuan peradaban yang diakui oleh semua pihak (Mustofa, 2019). Pada

masa pemerintahannya, Khalifah Harun al-Rasyid mengundang ilmuwan nonArab, termasuk dari kalangan Kristen, untuk mencari dan menerjemahkan manuskrip-manuskrip peninggalan para filosof Yunani.

Tidak hanya itu, untuk keperluan kemajuan pendidikan di dunia Arab, Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Perpustakaan Baitul Hikmah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan (Rusydi, 2023). Karya-karya yang terdapat di perpustakaan sangat lengkap, mulai dari ilmu filsafat, kedokteran, astronomi hingga sastra yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia seperti bahasa Yunani, Inggris dan lainnya (Hitti, 2005).

Gerakan penterjemahan manuskrip peninggalan Yunani mampu melahirkan sejumlah filosof dan ilmuwan ternama dalam sejarah Islam, seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Jabar, Al-Faraby, Ar-Razi, Ibnu Rusyd dan ratusan ilmuwan Islam klasik lainnya (Nasution, 1996). Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Umayyah II di Andalusia terbukti berkontribusi besar dalam membuka jalan bagi munculnya *renaissance* (kebangkitan kembali) Eropa setelah melewati masa-masa kegelapan yang sangat panjang.

Demikian juga dalam aspek penyediaan beasiswa untuk kaum pelajar yang ternyata masih dilakukan sampai zaman modern sekarang ini. Penduduk dari negara-negara berkembang terus didorong untuk belajar ke negara-negara maju. Kini, pemerintahan modern di banyak tempat menyediakan berbagai bentuk beasiswa untuk pelajar dari warga negaranya agar berkesempatan belajar ke tempat yang dianggap lebih maju. Pola ini telah berlaku semenjak masa kejayaan Islam di Andalusia (Spanyol) yang mana kaum pelajar dari negara-negara Eropa yang kala itu hidup dalam kegelapan, terutama Inggris dan Perancis, belajar ke Cordova, hingga era Sultanah Safiatuddin, bahkan masih berlaku hingga era post-modern sekarang ini.

Di Aceh modern sekarang ini juga tersedia Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai lembaga resmi yang menyalurkan aneka beasiswa untuk penduduk Aceh guna dapat mengecap Pendidikan tinggi di beberapa negara maju. Demikian dengan Indonesia melalui kebijakan berbagai kementerian termasuk Kementerian Agama RI, yang menyediakan beasiswa bagi anak-anak bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Sultanah Safiatuddin sangat luas wawasan sebagai konsekuensi dari banyak membaca.

Kehebatan Sultanah Safiatuddin di Kerajaan Aceh Darussalam sebagai pemimpin tidak diragukan lagi. Hal ini diakui oleh penulis asing yang konsen terhadap Aceh. Seorang penulis Belanda, H.C. Zentgraff, dalam bukunya berjudul "*Aceh*". Zentgraff tidak hanya mengakui keunggulan kaum perempuan dalam memimpin gerakan di Aceh. Dia bahkan menyebut kehebatan pemimpin gerakan dari kalangan perempuan di Aceh melebihi

kehebatan Ratu Catherine II dari Rusia. Karakter perempuan Aceh digambarkan dengan pernyataan *"keberanian kaum perempuan Aceh yang melebihi kaum wanita bangsa lainnya, dalam keberanian dan tidak gentar mati. Bahkan, mereka pun mampu melampaui kaum laki-laki Aceh yang sudah dikenal bukanlah laki-laki lemah dalam mempertahankan cita-cita bangsa dan agama mereka"*. (Zentgraaff, 1983).

Selama ini, ada kesan seakan tokoh-tokoh dari Eropa atau Amerika jauh lebih hebat dan layak menjadi rujukan. Ternyata setelah melalui kajian ini diketahui bahwa kepemimpinan perempuan di Aceh masa lampau, terutama dalam aspek pengembangan pendidikan, terbukti bahwa Sultanah Safiatuddin di Kerajaan Aceh Darussalam sangat mumpuni. Kiprah dan terobosan yang pernah dilakukan oleh Sultanah Safiatuddin dalam meningkatkan mutu SDM Aceh sangat visioner. Sultanah Safiatuddin mampu melakukan beberapa terobosan dalam kepemimpinan, terutama dalam memajukan sektor pendidikan di Aceh.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 59 tahun, Aceh pernah dipimpin oleh para Sultanah (ratu). Kemajuan yang paling dominan dan menjadi bahasan dalam artikel ini yaitu masa Sultanah Safiatuddin yang memimpin paling lama yaitu 34 tahun. Dalam masa 34 memerintah, Sultanah Safiatuddin telah melakukan berbagai terobosan dalam memajukan pendidikan Aceh. Aceh telah lebih dahulu menerapkan emansipasi perempuan dalam pemerintahannya. Sosok Sultanah Safiatuddin adalah perempuan cerdas, berakhlak, cinta ilmu pengetahuan serta memiliki ide-ide brilian yang luar biasa. Sultanah Safiatuddin paham bahwa negara akan meraih kemajuan manakala pendidikan warga negara ikut dimajukan. Karena itu, ia mencetuskan gagasan yang spektakuler yang semua itu ditiru serta dipraktikkan pada zaman modern sekarang ini.

Sultanah Safiatuddin menjaga kelestarian ilmu pengetahuan dengan cara memperkuat Sumber Daya Manusianya, memberdayakan ilmuwan dari dalam atau luar negeri untuk menjadi tenaga ahli dalam berbagai bidang. Para pakar tersebut berkiprah dan berjasa bagi kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya memelopori penulisan karya ilmiah dari para ulama serta memberikan beasiswa bagi para ulama untuk belajar di luar negeri. Kemajuan pembangunan infrastruktur pendidikan juga menjadi gagasan dan terobosan besar dari Sultanah Safiatuddin. Sultanah menjadikan meunasah sebagai pusat pendidikan, memopulerkan lembaga pendidikan Zawiyah (Dayah) serta membangun perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Semua kontribusi Sultanah Safiatuddin membuktikan bahwa kaum perempuan harus memiliki budi pekerti yang luhur, berpendidikan,

berwawasan luas, cerdas dalam segala bidang yaitu secara emosional, spiritual maupun intelektual.

Daftar Pustaka

- Adan, H. Y. (2013). *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh masa Kerajaan Aceh Darussalam*. NASA-Ar-Raniry Press.
- Amiruddin, H. (2006). *Aceh dan Serambi Makkah*. Yayasan PeNA.
- Ansori, A. H. (2015). Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Islam. *Qathruna: Jurnal Keilmuan Dan Pendidikan*, 2(2), 19–56.
- Ar-Raniry, N. (2021). *Bustan Al Salatin, terjemahan Rasyid Ridha dan Haniatur Rasyidah*. Perpusnas Press.
- Azhari, M., Jamal, A., Paisal, J., Anwar, Efendi, S., & Fisa, T. (2023). Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khutbah Jum`at Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat. *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 84–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v2i2.2250>
- Azward, R., Ismail, F., & Ismail, A. (2008). *Aceh Bumi Iskandar Muda*. PemProv Nanggroe Aceh Darussalam.
- Baqi, S. A., Aziz, M., & Windari, S. (2022). Pola Kepemimpinan Sultanah Aceh dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 1641-1699 M. *Journal of Islamic History*, 2(1), 48–62.
- Cibro, R. (2017). *Aksiologi Ma'rifah Hamzah Fansuri*. Padebooks.
- Cibro, R. (2019). Dari Wujudiyah Ke Ma'rifah: Geneologi Tasawuf Hamzah Fansuri. *At-Tafkir*, 12(1), 27–44.
<https://doi.org/10.32505/at.v12i1.591>
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Pengembangan Bakat dan Minat Serta Membentuk Karakter Islami Anak-Anak Gampong Layung Kec. Bubon Kab. Aceh Barat. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 361–372.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jkdm.v1i2.485>
- Fathoni, A. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Rineka Cipta.
- Fikri, M. (2016). Transformasi Tradisi Akademik Islam Dan Kontribusinya Terhadap Resolusi Konflik Agama di Aceh. *Aricis Proceedings*, 544–567.

- Hasjmy, A. (1997). *59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu. Bulan Bintang.*
- Haslinda, P. (2008). *Silsilah Raja-Raja Islam di Aceh dan Hubungannya dengan Raja-Raja Islam di Nusantara.* Pelita Hidup Insani.
- Hitti, P. K. (2005). *History Of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam.* Serambi.
- Idris, M. (2008). *Emansipasi Wanita Dalam An-Nidau Al-Khalid Karya; Najib Al-Kailani.* UIN Sunan Kalijaga.
- Iskandar, T. (2007). Aceh As A Muslim-Malay Cultural Centre (14th-19th Century). *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies.*
- Kurdi. (2021). *Fikrah Ulama Aceh: Kontribusi Karya Pengkajian Keislaman.* CV. Naskah Aceh.
- Majid, A. (2015). Karakteristik Pemikiran Islam Nuruddin Ar-Raniry. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 179–190.
- Mastori, Arifin, Z., & Safar, K. A. (2023). Relasi Syekh Nuruddin Ar Raniry Dengan Sultan Iskandar Tsani Pada Abad Ke-17. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1), 36–56.
- Matsyah, A. (2013). *Jatuh Bangun Kerajaan Islam di Aceh.* Penerbit Kaukaba.
- Mursyi, D. (2017). Kepemimpinan Para Perempuan Muslim Dari Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699). *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 5(1), 60–77. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i1.1990>
- Mustofa, A. (2019). Masa Keemasan Pendidikan Islam (Studi Tentang Peran Khalifah Harun Al - Rasyid Dalam Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 2–26. <https://doi.org/10.37286/ojs.v4i2.23>
- Musyaffa. (2018). Pemikiran dan Gerakan Dakwah Syeikh Nuruddin Ar-Raniry. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 18(1), 72–90. <https://doi.org/10.29300/syr.v18i1.1571>
- Nasution, H. (1996). *Islam Rasional.* Mizan.
- Ngongo, V. L., Taufiq Hidayat, & Wiyanto. (2019). Pendidikan Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.*

- Nordin, S. R. A., Suhaimy, K. A. M., Ani, F., Zainol, N. Z. N., Mohamed, N. K. W., Borham, A. S., & Bakar, S. K. S. A. (2018). Kepemimpinan Wanita Dalam Kesultanan Aceh Dar Al-Salam. *Human Sustainability Procedia*.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Riniwati, H. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Universitas Brawijaya Press.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Alim: Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Rusydi, I. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Islam Sejarah Kepemimpinan Khalifah Hārūn Al-Rashīd (786-809 M) Dan Khalifah Abd Al-Rahmān Al-Nāsir (929-961 M)*. A-Empat.
- Said, M. (1981). *Aceh Sepanjang Abad*. Waspada.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Pustaka Baru Perss.
- Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19–27. <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599>
- Syafaah, A. (2017). Peran Tokoh Wanita Pada Masa Kolonialisme. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 5(2), 110–123. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i2.2122>
- Syarbaini, A. (2022). Konsep Khilafah Menurut Ar-Raniry Dan Syiah Kuala:(Suatu Analisis Diskriptis). *JURNAL AZKIA: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v17i1.206>
- ZA, H. S. (2003). Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang. *Al Qalam*, 20(96), 125–142.
- Zentgraaff, H. C. (1983). *Aceh*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.